

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai cita-cita dalam menyejahterakan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-4 yang menjelaskan tentang tujuan Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pembangunan Nasional merupakan suatu proses yang berkesinambungan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wakhid, 2016). Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan adanya pembangunan tersebut, maka pemerintah dan masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pembangunan tidak hanya dilakukan secara sentralisasi atau terpusat melainkan juga secara desentralisasi. Pembangunan secara desentralisasi dilakukan untuk menelusuri dan mengembangkan suatu potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di daerah. Selain itu, adanya pembangunan secara desentralisasi juga dapat membuka akses bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan secara mandiri. Hal tersebut seperti yang tertulis dalam media online *Kemendesa.go.id*.

Kemendesa.go.id—...dengan pembangunan secara desentralisasi, di mana banyak hal yang kemudian diputuskan di daerah, tentu peluang berinovasi sangat besar.

Sumber : (<https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/4442/gus-halim-semangat-desentralisasi-hadirkan-peluang-inovasi-daerah>) diakses pada 12 September 2023

Berdasarkan berita di atas menunjukkan bahwa pembangunan desentralisasi menghadirkan peluang besar bagi daerah untuk berinovasi dalam membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri guna untuk menjadikan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional (Ayuningtyas & Wibawani, 2022). Hal tersebut karena penduduk Indonesia sebagian besar bertempat tinggal di wilayah pedesaan, sehingga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional.

Pembangunan dari desa merupakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri. Hal yang melandasi adanya pemerintahan desa adalah partisipasi, otonomi, demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan keanekaragaman (Sugiman, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas - batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kewenangan tersebut juga tercantum pada pasal 18, yaitu kewenangan desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan adat istiadat desa. Dengan demikian, pembangunan daerah adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan dan diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Negara Indonesia mempunyai banyak desa/kelurahan yang tersebar di berbagai provinsi. Berikut jumlah desa/kelurahan menurut provinsi di Indonesia :

Tabel 1.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi Tahun 2022

<i>Provinsi Province</i>	Jumlah Desa
Aceh	6 515
Sumatera Utara	6 113
Sumatera Barat	1 159
Riau	1 865
Jambi	1 562
Sumatera Selatan	3 263
Bengkulu	1 514
Lampung	2 654
Kepulauan Bangka Belitung	393
Kepulauan Riau	417
DKI Jakarta	267
Jawa Barat	5 957
Jawa Tengah	8 562
DI Yogyakarta	438
Jawa Timur	8 496
Banten	1 552
Bali	717
Nusa Tenggara Barat	1 151
Nusa Tenggara Timur	3 353
Kalimantan Barat	2 142
Kalimantan Tengah	1 576
Kalimantan Selatan	2 007
Kalimantan Timur	1 038
Kalimantan Utara	484
Sulawesi Utara	1 840
Sulawesi Tengah	2 020
Sulawesi Selatan	3 051

Sulawesi Tenggara	2 309
Gorontalo	734
Sulawesi Barat	650
Maluku	1 248
Maluku Utara	1 199
Papua Barat	1 987
Papua	5 561
Indonesia	83 794

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Berdasarkan tabel 1.1 data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia mempunyai desa/kelurahan sebanyak 83.794, yaitu dengan Provinsi Jawa Tengah mempunyai desa/kelurahan sebanyak 8.562. Provinsi Jawa Timur memiliki desa/kelurahan dengan jumlah 8.496 desa/kelurahan. Selanjutnya, Aceh mempunyai desa/kelurahan berjumlah 6.515, Provinsi Sumatera Utara memiliki desa/kelurahan dengan jumlah 6.113, dan 30 provinsi lainnya mempunyai jumlah desa/kelurahan di bawah 6.000. Adapun tujuan adanya pembangunan desa, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan sarana dan prasarana, serta sebagai upaya dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Desa sebagai tempat untuk mengidentifikasi masalah masyarakat, perencanaan, dan pencapaian tujuan nasional tingkat desa, sehingga desa menjadi tempat strategis bagi pembangunan nasional.

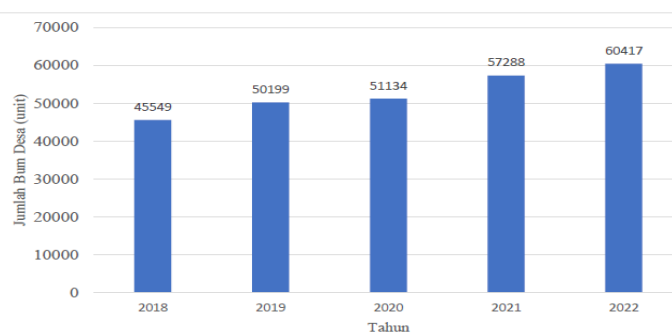
Desa merupakan garda depan dalam kemajuan Indonesia (Setiawan & Bharata, 2022). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan perekonomian desa, salah satunya yaitu melalui program

pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Seperti yang tertulis dalam media online *Sekretariat Negara*.

Sekretariat Negara.go.id—Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk membangun dan menjadikan desa sebagai basis kegiatan ekonomi yang produktif. Presiden juga menegaskan agar BUM Desa dapat memacu pertumbuhan usaha baru yang dibutuhkan di masyarakat.

Sumber:(https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_libatkan_bum_desa_dalam_transformasi_ekonomi) diakses pada 12 September 2023

Berdasarkan berita di atas menunjukkan bahwa Pemerintah mengajak masyarakat untuk membangun desa sebagai basis kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Adapun tujuan pembentukan BUM Desa juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang menjelaskan bahwa Desa membentuk BUM Desa sebagai kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, produktivitas, potensi desa, pengembangan investasi, tersedianya pelayanan publik, dan untuk kemakmuran penduduk desa dan dapat menyediakan bentuk usaha lainnya. Dengan demikian, adanya pembentukan BUM Desa tersebut dapat membangun kemandirian masyarakat desa. Berikut ini jumlah BUM Desa di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2022, yaitu :



Gambar 1.1 Jumlah BUM Desa di Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), diolah oleh penulis tahun 2023

Berdasarkan gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa BUM Desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), jumlah BUM Desa di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 60.417 unit. Jumlah BUM Desa pada tahun 2022 telah meningkat tajam dari tahun 2018 yang hanya memiliki BUM Desa sebanyak 45.549 unit. BUM Desa dibentuk oleh pemerintah desa untuk memanfaatkan seluruh potensi ekonomi, kelembagaan ekonomi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Oleh karena itu, BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terbesar dan terluas di Pulau Jawa yang memiliki luas wilayah sekitar 48.037 km² dan dengan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2023, secara administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten, 9 Kota, 666 Kecamatan, 777 Kelurahan, dan 8.496 Desa. Dengan jumlah desa yang cukup banyak, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan desa sebagai sasaran utama dalam pengembangan BUM Desa.



Gambar 1.2 Persebaran Jumlah BUM Desa Per Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, diakses pada 15 September 2023

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat banyak BUM Desa yang tersebar di Provinsi Jawa Timur. Menurut data dari DPMD Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur memiliki BUM Desa sebanyak 6.118. Dari total jumlah tersebut yang tergolong dalam kategori maju sebanyak 537 BUM Desa, kategori berkembang dengan jumlah 2.285 BUM Desa, dan pemula ada 3.296 BUM Desa. Jumlah BUM Desa tersebut telah mengalami peningkatan, pada tahun 2019 BUM Desa di Jawa Timur berjumlah 5.019 unit. Dengan adanya pertambahan jumlah BUM Desa setiap tahunnya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Kabupaten Sidoarjo sebagai kabupaten penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya dan merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 Kecamatan, 31 Kelurahan, dan 322 Desa. Akan tetapi, tidak semua desa di Kabupaten Sidoarjo memiliki BUM Desa. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa (DPMD) Sidoarjo, jumlah BUM Desa yang terdata di Kabupaten Sidoarjo hingga bulan September 2023 sebanyak 263 BUM Desa.

BUM Desa sebagai wadah usaha bagi desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengelola unit-unit usaha guna meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, setiap desa harus memiliki BUM Desa. Adanya hal tersebut membuat seluruh pemerintah daerah terdorong untuk menerapkannya, salah satunya pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang tertulis dalam media online *JawaPos.com*.

JawaPos.com—Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terus mendorong supaya setiap desa di kabupaten harus memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) dengan tujuan agar semua desa bisa lebih cepat mandiri. Dengan membentuk BUMDes merupakan langkah yang tepat karena akan mempercepat kemandirian desa. Kemandirian desa harus diciptakan, karena dengan begitu ekonomi masyarakatnya akan menjadi kuat.

Sumber : (<https://www.jawapos.com/surabaya-rama/01276428/pemkab-sidoarjo-dorong-setiap-desa-miliki-bumdes>) diakses pada 15 September 2023.

Berdasarkan berita di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong agar setiap desa harus mempunyai BUM Desa. Pemerintah desa dapat memanfaatkan dana desa dalam pembentukan BUM Desa tersebut, agar setiap desa nantinya dapat menjadi mandiri. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jumlah BUM Desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan kategorinya, yaitu:

Tabel 1.2 Jumlah Kategori BUM Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No	Kategori	Jumlah
1.	Maju	61
2.	Berkembang	70
3.	Pemula	132

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo, diolah oleh penulis tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah BUM Desa di Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam kategori maju ada 61 unit, kategori berkembang ada 70 unit, dan kategori pemula ada 132 unit. Dengan adanya pembentukan BUM Desa di setiap kabupaten atau kota dapat menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa. Selain itu, adanya BUM Desa juga dapat berfungsi sebagai lembaga sosial yang mementingkan kepentingan masyarakat dalam penyediaan layanan.

Desa Wage merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Sidoarjo dan memiliki luas wilayah mencapai 207 Hektare. Desa Wage mempunyai potensi sumber daya alam yang bisa dikelola dengan baik, yaitu lahan persawahan yang luas dan menjadi penghasil sektor pertanian, yaitu beras yang bagus dan berkualitas. Akan tetapi, dengan seiring berjalannya waktu lahan persawahan tersebut digantikan oleh bangunan perumahan dan pertokoan, sehingga potensi alam yang dimiliki semakin berkurang. Dengan demikian, potensi alam yang masih bisa dikelola dan dikembangkan, yaitu lapangan dewata Desa Wage.

3051	KABUPATEN SIDOARJO	KECAMATAN TAMAN	DESA KRAMATJEGU	1669170749	MAJU SEJAHTERA KRAMATJEGU	2021 PEMULA
3052	KABUPATEN SIDOARJO	KECAMATAN TAMAN	DESA TROSOBO	1549954021	BUMDES-TROSOBO SUKSES	2021 PEMULA
3053	KABUPATEN SIDOARJO	KECAMATAN TAMAN	DESA SIDODADI	1615336763	SIDODADI MAKMUR	2019 BERKEMBANG
3054	KABUPATEN SIDOARJO	KECAMATAN TAMAN	DESA BRINGINBENDO	1624867649	MAJU JAYA MAKMUR BRINGINBENDO	2021 BERKEMBANG
3055	KABUPATEN SIDOARJO	KECAMATAN TAMAN	DESA SAMBI BULU	1549954020	SAMBI MADU	2018 MAJU
3056	KABUPATEN SIDOARJO	KECAMATAN TAMAN	DESA KREMBANGAN	1634478332	Bhineka Jaya Krembangan	2021 PEMULA
3057	KABUPATEN SIDOARJO	KECAMATAN TAMAN	DESA JEMUNDO	1549954018	BUMDES MANDIRI SENTOSA	2022 BERKEMBANG
3058	KABUPATEN SIDOARJO	KECAMATAN TAMAN	DESA SADANG	1549954019	BUMDES-ANUGRAH	2014 BERKEMBANG
3059	KABUPATEN SIDOARJO	KECAMATAN TAMAN	DESA BOHAR	1644200162	BUMDES RAHARJA	2018 PEMULA
3060	KABUPATEN SIDOARJO	KECAMATAN TAMAN	DESA WAGE	1615272915	Wage Bersinar	2019 MAJU
3061	KABUPATEN SIDOARJO	KECAMATAN TAMAN	DESA KEDUNGTURI	1549954017	BUMDES SURYA SEJAHTERA KEDUNGTURI	2014 BERKEMBANG

Gambar 1.3 Klasifikasi BUM Desa Berdasarkan Kategori

Sumber : Data Desa Center (DDC) Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, diakses pada 28 Januari 2024

Berdasarkan gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa Desa Wage adalah salah satu desa yang memiliki BUM Desa berkategori maju. BUM Desa “Wage Bersinar” dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor: 06/BPD/V/2019 tanggal 4 April 2019. Kemudian disahkan dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 3 Mei 2019 oleh Kepala Desa Wage yaitu Bambang Heri. BUM Desa “Wage Bersinar” kerap kali meraih penghargaan. Sebagai desa yang berhasil membangun BUM Desa, Desa Wage sendiri juga mempunyai beberapa prestasi yang membanggakan. Seperti yang tertulis dalam media online *Jawapes.or.id*.

Jawapes.or.id—Bapak H. Saifulillah, SH.M.Hum mengatakan bahwa "Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menaungi desa sangat mengapresiasi program desa melangkah, mengingat desa juga membutuhkan pelatihan seperti pelatihan bumdes, pelatihan membentuk karakter Pemuda desa dan pemberdayaan untuk mendukung terciptanya desa yang mandiri. Desa peraih Award, yaitu untuk juara partisipasi masyarakat juara pertama diraih oleh Desa Banjar Kemuning, juara 2 Desa Kedung Suko, dan juara 3 Desa Wage."

Sumber : (<https://www.jawapes.or.id/2019/11/program-desa-melangkah-beri-penghargaan.html>) diakses pada 15 September 2023

Berdasarkan berita di atas menunjukkan bahwa Desa Wage mendapatkan juara 3 dalam Lomba Desa Melangkah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019. Dengan memperoleh penghargaan dalam program tersebut, Desa Wage diharapkan dapat mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, sehingga menjadi salah satu desa percontohan nasional. Kemudian pada tahun 2022, BUM Desa “Wage Bersinar” juga memperoleh juara 1 Lomba Obyek Wisata Kabupaten Sidoarjo (Fitriana & Epriliano, 2022). Dengan adanya penghargaan tersebut menunjukkan keberhasilan dan perkembangan yang lebih baik atas pengelolaan unit usaha oleh BUM Desa Wage. Selain itu, wujud keberhasilan melalui

terbentuknya unit usaha sesuai dengan tujuan hadirnya BUM Desa, yaitu menjadikannya sumber perekonomian baru bagi masyarakat desa. BUM Desa “Wage Bersinar” memiliki dua unit usaha yang dikelola, yaitu :

Pertama, Unit usaha taman budaya berupa Lapangan Dewata. Unit usaha ini yang pada awalnya hanya digunakan untuk lapangan sepak bola dan kemudian direnovasi sedemikian rupa hingga lapangan tersebut berubah menjadi multi fungsi. Tidak hanya untuk berolahraga, akan tetapi juga berfungsi untuk tempat wisata hingga menjadi tempat untuk berjualan para pedagang dan pemilik UMKM di Desa Wage. Antusias masyarakat Desa Wage dan sekitarnya cukup besar dengan kehadiran wajah baru dari Lapangan Dewata. Adanya hal tersebut menjadikan pendapatan desa dan perekonomian masyarakat desa juga ikut meningkat.

Tabel 1.3 Pendapatan Unit Usaha Taman Budaya Tahun 2022

No	Bulan	Pendapatan (Rp)
1.	Januari	3.900.000
2.	Februari	2.671.500
3.	Maret	4.090.000
4.	April	4.080.000
5.	Mei	3.694.500
6.	Juni	14.479.000
7.	Juli	7.707.000
8.	Agustus	4.162.500
Jumlah		44.784.500

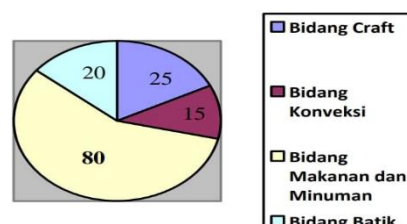
Sumber : BUM Desa “Wage Bersinar”, diolah oleh Penulis 2023

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 pendapatan BUM Desa “Wage Bersinar” dari unit usaha taman budaya ini mengalami naik turun. Kenaikan pendapatan terjadi pada bulan Juni, yaitu sebesar Rp14.479.000. Adanya peningkatan tersebut disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adanya penyewaan tempat oleh pemilik wahana-wahana khusus anak dan beberapa

kegiatan atau event. Dengan banyaknya event-event yang diselenggarakan, maka bertambah pula para pelaku UMKM yang berjualan di area tersebut yang berkontribusi untuk menambahkan pendapatan pada unit usaha ini. Meskipun pendapatan pada tahun 2022 ini mengalami naik turun, namun jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2021 jumlah pendapatan ini mengalami peningkatan yang sangat tajam. Pada tahun 2022 jumlah pendapatan yang diperoleh mencapai Rp44.784.500, sedangkan pada tahun 2021 jumlah pendapatan yang didapatkan hanya sebesar Rp23.270.500.

Dengan demikian, besarnya pendapatan yang dihasilkan tersebut menunjukkan bahwa selama ini operasionalisasi BUM Desa “Wage Bersinar” dilakukan secara independen. Operasionalisasi BUM Desa “Wage Bersinar” bukan dari dana desa melainkan dari pendapatan BUM Desa itu sendiri. Oleh karena itu, dengan pendapatan yang dihasilkan tersebut menjadikan BUM Desa “Wage Bersinar” dapat memberikan kontribusi lebih untuk desa.

Kedua, Unit usaha bina UMKM. Unit usaha ini juga diharapkan menjadi penggerak perekonomian desa karena sebagian besar warga Desa wage bermata pencaharian sebagai pelaku UMKM. Unit usaha bina UMKM ini terbagi kedalam beberapa bidang UMKM. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.4 Jumlah UMKM di Desa Wage Tahun 2022

Sumber : (Fitriana & Eprilianto, 2022)

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan bahwa unit usaha ini terbagi menjadi 4 bidang UMKM, meliputi UMKM bidang craft/kerajinan, UMKM bidang konveksi, UMKM bidang makanan dan minuman, serta UMKM bidang batik. Adapun pada tahun 2022, UMKM pada bidang makanan dan minuman yang memiliki jumlah paling banyak di BUM Desa “Wage Bersinar” yaitu sebanyak 80 UMKM. Dengan adanya BUM Desa ini sangat dirasakan oleh para pemilik UMKM di Desa Wage, hal tersebut dikarenakan terjadi banyak perubahan dan pembangunan yang lebih maju untuk mendukung adanya UMKM di Desa Wage. Selain pengelolaan UMKM, BUM Desa “Wage Bersinar” juga memberikan pinjaman modal usaha untuk para pelaku UMKM. Dengan adanya pinjaman modal usaha ini, pelaku UMKM bisa membuka atau mengembangkan usahanya.

Tabel 1.4 Pendapatan Unit Usaha Bina UMKM Tahun 2022

No	Bulan	Pendapatan (Rp)
1.	Januari	-
2.	Februari	4.900.000
3.	Maret	1.800.000
4.	April	1.400.000
5.	Mei	2.100.000
6.	Juni	-
7.	Juli	2.400.000
8.	Agustus	2.000.000
Jumlah		14.600.000

Sumber : BUM Desa “Wage Bersinar”, diolah oleh Penulis 2023

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa pendapatan BUM Desa “Wage Bersinar” yang diperoleh dari unit usaha ini pada bulan januari hingga bulan Agustus tahun 2022 yaitu sebesar Rp14.600.000. Pada bulan Januari dan bulan Juni tidak ada pemasukan dikarenakan tidak adanya pengajuan pinjaman. Dengan

demikian, adanya unit usaha ini memberikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

BUM Desa “Wage Bersinar” juga sedang mengembangkan unit usahanya. Adapun unit usaha yang sedang direncanakan pada saat ini adalah unit usaha layanan berupa pengolahan sampah dan unit usaha jasa berupa pembayaran secara online. Adanya unit usaha jasa tersebut nantinya akan mempermudah masyarakat desa untuk melakukan berbagai jenis pembayaran baik pembayaran listrik maupun pajak.

Dalam mengembangkan unit- unit usaha BUM Desa Wage juga tidak lepas dari adanya pengendalian perusahaan dalam pengelolaannya, sehingga BUM Desa tersebut mampu mempertahankan produktivitas dan sumber daya alam yang ada. Pada saat ini untuk mengelola BUM Desa diperlukan tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* supaya terhindar dari kecurangan oknum tertentu yang mengambil keuntungan untuk kepentingan individu. *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder* (Manossoh, 2016). Tujuan dari adanya *Good Corporate Governance*, yaitu untuk mencegah terjadinya praktik-praktik tidak sehat, mendorong transparansi perusahaan, dan memaksimalkan kinerja.

Seluruh potensi yang dimiliki oleh Desa Wage baik potensi alam maupun potensi sumber daya manusia harus dikelola dengan baik supaya terus berkembang dan dapat mendorong perekonomian semakin maju dengan pesat. Dengan demikian, *Good Corporate Governance* dapat dijadikan instrumen pengelolaan

yang baik. Penerapan *Good Corporate Governance* ke dalam lingkungan suatu perusahaan pemerintah, salah satunya BUM Desa “Wage Bersinar” dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Semakin tinggi penerapan *Good Corporate Governance* dalam BUM Desa diharapkan akan membantu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance* pada BUM Desa “Wage Bersinar” dapat menjadi tolak ukur penilaian dalam pengelolaannya.

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Wage Bersinar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adanya hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Wage Bersinar di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Wage Bersinar di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa (BUM Desa) Wage Bersinar di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
 - a. Penelitian ini berguna untuk penunjang pendidikan dan bahan pembandingan bagi penelitian lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang
 - b. Dapat dijadikan sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Bagi BUM Desa “Wage Bersinar”

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan wawasan sebagai masukan dalam pengelolaan BUM Desa guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

3. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat memperdalam ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan BUM Desa dengan prinsip *Good Corporate Governance*
- b. Dapat menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan program studi Administrasi Publik.